



**KREDIBILITAS KOMUNIKASI PUBLIK KADER PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS
(Studi Kasus pada Kelompok Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui
di Kampung Babakan Ampera)**

***PUBLIC COMMUNICATION CREDIBILITY OF FAMILY
EMPOWERMENT AND WELFARE CADRES REGARDING
THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM
(A Case Study of Toddlers, Pregnant Women, and Breastfeeding Mothers in
Kampung Babakan Ampera)***

Rinda Azharadin^{1*}, Aulia Asmarani²

^{1*}International Women University, Email : rindanda07@gmail.com

²International Women University, Email : aulia@iwu.ac.id

*email koresponden: rindanda07@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i3.3236>

Abstrack

This study is motivated by the involvement of Family Welfare Empowerment (PKK) cadres as facilitators for the Free Nutritious Meal (MBG) Program in Kampung Babakan Ampera, despite their lack of formal legal status such as an official appointment decree (SK) or the bureaucratic authority possessed by government officials. This situation raises questions regarding how the public communication credibility of PKK cadres is established amidst their limited formal legal standing. The study aims to analyze the public communication credibility of PKK cadres acting as MBG Program facilitators and to explain the role of limited formal legal status in the formation of that credibility. The research subjects consist of PKK cadres serving as key informants directly involved as MBG Program facilitators—and the "B3" group (pregnant women, breastfeeding mothers, and mothers with toddlers) as the program's beneficiaries and primary informants. The study employs a constructivist paradigm, utilizing qualitative methods and a case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was verified through source triangulation and technique triangulation. The results indicate that the public communication credibility of PKK cadres is built through competence in performing facilitation duties and trustworthiness the latter being formed by social closeness, experience in providing support, and consistent service to the community. The lack of formal legal status does not diminish public trust in PKK cadres, as credibility is shaped more by interpersonal relationships and social capital than by administrative legality. The study concludes that public communication credibility at the grassroots level can be established through sustained social interaction. Therefore, the government needs to strengthen institutional support, grant formal legal



status, and enhance the communication capacity of PKK cadres to ensure the Free Nutritious Meal Program is implemented more effectively and sustainably.

Keywords: *Credibility, Public Communication, PKK Cadres, Free Nutritious Meals.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagai fasilitator Program Makan Bergizi Gratis di Kampung Babakan Ampera meskipun tidak memiliki legalitas formal berupa Surat Keputusan (SK) maupun kewenangan birokratis sebagaimana aparatur pemerintah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kredibilitas komunikasi publik kader PKK terbentuk di tengah keterbatasan legalitas formal yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kredibilitas komunikasi publik kader PKK sebagai fasilitator Program MBG serta menjelaskan keterbatasan legalitas formal dalam pembentukan kredibilitas tersebut. Subjek penelitian terdiri dari kader PKK sebagai informan kunci yang terlibat langsung sebagai fasilitator Program MBG dan kelompok B3 yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita sebagai penerima manfaat program sebagai informan utama. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas komunikasi publik kader PKK dibangun melalui kompetensi dalam menjalankan tugas fasilitasi dan kepercayaan yang terbentuk dari kedekatan sosial, pengalaman pendampingan, serta konsistensi pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan legalitas formal tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kader PKK karena kredibilitas lebih banyak dibentuk oleh hubungan interpersonal dan modal sosial dibandingkan legalitas administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kredibilitas komunikasi publik pada tingkat akar rumput dapat terbentuk melalui interaksi sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat dukungan kelembagaan, pemberian legalitas, serta peningkatan kapasitas komunikasi kader PKK agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kredibilitas, Komunikasi Publik, Kader PKK, Makan Bergizi Gratis.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kampung Babakan Ampera, Desa Jayagiri, Lembang, yang dimulai sejak 10 Januari 2026, menyasar kelompok B3 yang meliputi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pengelolaan operasional dan pendistribusian program ini dipercayakan kepada para kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Penunjukan ini didasarkan pada pengalaman panjang kader PKK dalam mendampingi kelompok B3 di tingkat akar rumput, sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Tata Kelola Program MBG Tahun 2026.

Tanggung jawab kader PKK dalam program ini sangat kompleks. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis yang melakukan pendataan administratif, kontrol kualitas pangan, dan distribusi langsung ke rumah warga, tetapi juga mengemban fungsi komunikasi publik. Kader PKK menjadi jembatan informasi, fasilitator, dan penghubung utama antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan mekanisme serta jadwal program MBG (Ningtias, 2024).

Kendati memegang peran vital, kader PKK menghadapi dilema hukum dan dualisme posisi. Secara struktural, PKK diakui sebagai mitra pemerintah berdasarkan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 yang salah satu fokusnya adalah sektor pangan dan gizi keluarga (Hanis & Marzaman, 2020). Namun, regulasi tersebut menempatkan PKK sebagai gerakan kemasyarakatan, bukan lembaga birokrasi resmi (Suryakusuma, 2021). Akibatnya, para kader memiliki legalitas formal yang terbatas dan tidak dibekali Surat Keputusan (SK) penugasan kedinasan khusus untuk mendistribusikan MBG, di mana mereka bernaung di bawah Tim Pendamping Keluarga (TPK) kecamatan.

Beban tugas publik yang masif ini sering kali disandarkan pada kerelaan dan dedikasi sosial para kader perempuan, sehingga kerja keras mereka kerap dipandang sebagai pengabdian sukarela alih-alih



pekerjaan profesional yang dilindungi jaminan legalitas resmi. Keterbatasan legalitas dan kompetensi formal ini berpotensi menimbulkan tantangan di lapangan, mengingat kejelasan informasi dan legitimasi sangat memengaruhi kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat (Fitriani, 2022).

Meskipun memiliki keterbatasan legalitas formal, realitas di Kampung Babakan Ampera menunjukkan respons yang positif. Jumlah penerima program MBG meningkat dari 142 orang pada Januari 2026 menjadi 167 orang pada Juni 2026, tanpa adanya penolakan dari kelompok B3. Tingginya tingkat penerimaan ini didukung oleh modal sosial yang telah lama dibangun oleh kader PKK melalui interaksi interpersonal dalam ruang domestik warga, seperti pendampingan persalinan, pengurusan BPJS, hingga bantuan kesehatan lainnya. Kedekatan emosional dan sosial tersebut berpotensi membentuk kredibilitas komunikasi publik mereka di mata masyarakat.

Dalam kajian komunikasi publik, kredibilitas sumber merupakan faktor kunci yang memengaruhi penerimaan pesan dan respons masyarakat (Dominic et al., 2025). Sejumlah studi terdahulu telah membahas peran kader PKK, tantangan legitimasi formal, hingga kebutuhan aplikasi pendukung program MBG (Wijaya, 2026). Namun, terdapat celah akademis karena belum banyak penelitian yang mengeksplorasi interaksi antara keterbatasan legalitas formal birokrasi dengan kualitas relasi sosial dalam membentuk kredibilitas komunikasi publik kader pada program strategis nasional.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana kredibilitas komunikasi publik kader PKK terbentuk dalam menjalankan Program MBG bagi kelompok B3 di Kampung Babakan Ampera, dengan mengkaji hubungan antara kedekatan sosial, kompetensi praktis, dan keterbatasan legalitas formal yang mereka miliki.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode kualitatif dan desain studi kasus tunggal untuk memahami secara mendalam pembentukan kredibilitas komunikasi publik kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai fasilitator Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kampung Babakan Ampera, Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pemahaman terhadap pelaksanaan program, yang terdiri atas kader PKK sebagai informan kunci dan kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, serta balita atau ibu dari balita sebagai informan utama.

Data dikumpulkan melalui observasi partisipasi pasif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman mengenai proses komunikasi, interaksi, serta persepsi masyarakat terhadap kredibilitas kader PKK. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari kader PKK dan masyarakat, serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Kampung Babakan Ampera mulai 3 Februari 2026 hingga penelitian selesai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Babakan Ampera, yang terletak di Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, berada di dataran tinggi dengan luas sekitar 2,93 km² dan dipimpin oleh seorang Ketua RW bernama Asep Rustandi yang dibantu oleh lima Ketua RT. Wilayah ini dihuni oleh 1.332 jiwa (data 2026) yang sebagian besar bekerja sebagai buruh harian lepas, peternak, dan petani, dengan tingkat pendidikan rata-rata tamatan SMP.

Kader PKK di Kampung Babakan Ampera, yang sebagian besar merangkap sebagai kader Posyandu, beranggotakan enam orang di bawah kepemimpinan Santiwati Nuraini. Dalam pelaksanaannya, mereka memegang peran vital sebagai penghubung antara pemerintah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan masyarakat, terutama dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok B3 (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) sejak Januari 2026.



Pelaksanaan Program MBG melibatkan tugas pendataan, penjemputan makanan dari SPPG menggunakan sepeda motor karena akses jalan yang sempit, hingga pendistribusian di tiga titik wilayah. Jumlah penerima manfaat menunjukkan tren stabil dan meningkat dari 142 orang pada Januari 2026 menjadi 167 orang pada Juni 2026, di mana perubahannya murni dipengaruhi oleh faktor demografis alami kelompok sasaran.

Dalam komunikasinya dengan kelompok B3, kader PKK memanfaatkan grup *WhatsApp* serta penyampaian langsung dari mulut ke mulut untuk menyiasati warga yang tidak menggunakan media sosial. Meskipun menghadapi beberapa hambatan seperti akses jalan yang terjal, keluhan kualitas makanan, serta protes mengenai porsi dan anggaran, kader secara aktif melakukan uji organoleptik, penanganan keluhan secara persuasif, dan evaluasi rutin. Berdasarkan penilaian kelompok B3, kader PKK dinilai memiliki kredibilitas dan tingkat kepercayaan yang baik karena kedekatan sosial serta dedikasi mereka, meskipun para kader berharap adanya Surat Keputusan (SK) resmi di masa mendatang untuk memperkuat legitimasi peran mereka dalam program ini.

1. Kebutuhan Warga sebagai Titik Awal Komunikasi

Penerimaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahap awal tidak didorong oleh persepsi kredibilitas kader PKK, melainkan oleh kebutuhan mendesak kelompok B3 (Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui) terhadap bantuan pangan. Hal ini terlihat dari lonjakan partisipasi Posyandu yang drastis, yakni dari sekitar 30% sebelum program menjadi 80% setelah program berjalan.

Kebutuhan ini memicu interaksi yang lebih intensif antara kader PKK dan warga, mulai dari proses pendataan, distribusi makanan, hingga konsultasi kendala. Hubungan yang sebelumnya hanya terjalin sebulan sekali di Posyandu kini berkembang menjadi komunikasi rutin. Proses berulang ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai karakter, sikap, dan komitmen kader, sehingga kepercayaan dan kredibilitas komunikasi terbentuk secara bertahap melalui pengalaman sosial yang berkelanjutan.

2. Model Komunikasi dan Efektivitas Tanpa Aplikasi Digital

Kader PKK menjalankan model komunikasi publik satu arah yang informatif (*public information*) dengan memanfaatkan media sederhana berupa WhatsApp Group yang dipadukan dengan komunikasi tatap muka. Informasi seputar jadwal distribusi, menu makanan (melalui status WhatsApp), hingga hasil uji organoleptik disampaikan secara efektif.

Temuan ini memberikan perspektif berbeda dari penelitian terdahulu yang mengasumsikan efektivitas komunikasi program MBG wajib didukung oleh aplikasi digital khusus (Wijaya, 2026). Di Kampung Babakan Ampira, kesederhanaan media tertutupi oleh kekuatan hubungan interpersonal yang sudah lama terbangun melalui berbagai aktivitas kemasyarakatan sebelumnya, membuat informasi tetap tersampaikan dan dipahami dengan baik.

3. Dominasi *Trustworthiness* atas *Expertise Formal*

Dalam kerangka *Source Credibility Theory* oleh Carl Hovland, kredibilitas kader PKK di mata kelompok B3 lebih didominasi oleh dimensi keterpercayaan (*trustworthiness*) ketimbang keahlian profesional (*expertise*). Sebagian besar kader berpendidikan SMP dan tidak memiliki latar belakang medis atau gizi profesional. Namun, rekam jejak panjang mereka dalam pendampingan kesehatan dan posyandu membuat warga mempersepsikan mereka memiliki keahlian praktis di tingkat akar rumput. Kader juga menunjukkan integritas dengan tidak bersikap spekulatif ketika menghadapi hal di luar kewenangan, melainkan mengarahkannya ke pihak yang berwenang. Kepercayaan warga lahir dari kedekatan sosial (*social proximity*) dan kesamaan identitas sebagai sesama warga yang saling mendukung, bukan karena adanya Surat Keputusan (SK) atau legitimasi birokrasi formal.

4. Manifestasi "Ibuisme Negara" (*State Ibuism*)

Keterlibatan kader PKK dalam program nasional ini mencerminkan konsep *Ibuisme Negara* (Suryakusuma, 2021). Negara mengonstruksi perempuan sebagai sosok yang identik dengan fungsi pengasuhan dan kepedulian, sehingga tugas-tugas birokratis, administratif, hingga distribusi logistik skala masif dibebankan kepada kader PKK di bawah kedok "pengabdian sosial kemasyarakatan." Akibatnya, kerja profesional yang berat ini dijalankan tanpa jaminan hukum formal atau honorarium yang layak dan sepadan dengan beban kerja mereka.



5. Adaptasi Lokal dan Negosiasi Kebijakan di Akar Rumput

Kondisi geografis Kampung Babakan Ampera yang sempit dan curam menyulitkan akses kendaraan roda empat milik SPPG. Hal ini memicu hambatan operasional di mana kader harus menjemput dan mengantar ratusan ompreng dengan kendaraan pribadi, sementara honor yang diterima hanya Rp1.000 per ompreng.

Untuk mengatasi kesenjangan antara desain kebijakan formal dan realitas lapangan ini, kader PKK bersama kelompok B3 melakukan negosiasi di tingkat akar rumput dengan menyepakati iuran transportasi swadaya sebesar Rp2.000. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya kolektivisme dan modal sosial di pedesaan mampu berfungsi sebagai mekanisme pemecahan masalah (*problem solving*). Di sisi lain, munculnya ketakutan kader agar iuran tersebut tidak diketahui oleh Pemerintah Desa menunjukkan adanya hambatan psikologis dan komunikasi vertikal yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap kondisi riil di lapangan.

4. KESIMPULAN

Kredibilitas komunikasi publik kader PKK terbentuk melalui pengalaman dan kejujuran dalam berinteraksi dengan masyarakat. Pengalaman kader dalam menjalankan Posyandu, pendataan warga, pendampingan ibu hamil, pelayanan kesehatan, serta berbagai kegiatan sosial membentuk *expertise* yang bersifat praktis dan kontekstual. Sementara itu, *trustworthiness* terbentuk melalui kejujuran dalam menyampaikan kondisi kelayakan pangan (uji organoleptik), keterbukaan batas kewenangan, serta konsistensi pelayanan membentuk persepsi publik bahwa kader adalah komunikator yang handal dan dapat dipercaya, meskipun tidak memiliki latar belakang keilmuan gizi formal. Dengan demikian, kredibilitas kader PKK di mata kelompok B3 tidak semata-mata berasal dari penguasaan teknis program, tetapi dari perpaduan antara pengalaman yang menghasilkan kompetensi praktis dan integritas personal yang ditunjukkan melalui kejujuran serta keterbukaan dalam berkomunikasi.

Keterbatasan legalitas formal kader PKK diimbangi oleh legitimasi sosial yang terbentuk melalui kedekatan dengan masyarakat. Ketiadaan Surat Keputusan khusus sebagai pelaksana Program MBG dan terbatasnya dukungan operasional tidak menghilangkan kepercayaan kelompok B3 karena kader telah memiliki rekam jejak hubungan sosial sebelum program dilaksanakan. Kedekatan tersebut tidak hanya membuat informasi kader lebih mudah diterima, tetapi juga memungkinkan kader dan masyarakat melakukan komunikasi, musyawarah, dan penyesuaian lokal dalam menghadapi kendala pelaksanaan program. Dengan demikian, pada tingkat akar rumput, legitimasi sosial yang dibangun melalui kedekatan, kepercayaan, dan pengalaman bersama menjadi mekanisme yang memperkuat kredibilitas komunikasi ketika legitimasi formal masih terbatas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. (2024). Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif: Suatu pengantar. Effendy, O. U. (2009). *Ilmu komunikasi teori dan praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., & Untari, R. S. (2023). Metodologi penelitian pendidikan (Prosedur penelitian, subyek penelitian, dan pengembangan teknik pengumpulan data). *Umsida Press*, 1-64.
- Suryakusuma, J. I. (2021). *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Komunitas Bambu.
- Wulan, E. P. S., Pattiasina, P. J., Putra, B. A., Arianto, T., Saragih, R. B., Mardiana, M., & Aziz, B. (2024). *Retorika dan Dialektika Komunikasi Publik*. CV. Gita Lentera.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- De Lima, F. V. I., Titaley, C. R., Que, B. J., Malakauseya, M. L. V., Hussein, A. L., Saptanno, L., Ohoiulun, A., Liesay, L. S., Wijaya, A. E., & Ulandari, P. (2021). KEPERCAYAAN TERHADAP KADER DALAM MENJALANKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA



- POSBINDU PTM DI PULAU SAPARUA DAN KOTA AMBON. *Molucca Medica*, 12–25. <https://doi.org/10.30598/molmed.2021.v14.ik.12>
- Efendi, E., Andy Akbar, Arizah Laila Madani, Luthfyah Az Zahra, Mhd. Sabili Al Ghazi Nst, & Utsman Fajri Ramadhan. (2024). Analisis Unsur-unsur Komunikasi, Media Komunikasi, Metode Komunikasi, Efek Komunikasi. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(3), 1293–1300. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.1021>
- Erialdy, & Muhtadi, Y. (2021). Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Pada Kegiatan Musrenbang Di Kelurahan Kenanga Kecamatan CipondohTangerang. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2).
- Maulani, R. Z., Syarah, M. M., & Susilowati, S. (2024). Peran Komunikasi Publik Melalui Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di BKN RI. *Brand Communication*, 3(4), 365–375. <https://doi.org/10.70704/bc.v3i4.326>
- Mucharam, A. (2022). *MEMBANGUN KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF*.
- Mukhlash Abrar. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*.
- Nurdin, A., Suhartini, Rr., & Zainiyati, H. S. (2024). Komunikasi Religius Masyarakat Akar Rumput 'Tak Tersentuh Media Online.' *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 937. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.2837>
- Nurzukhrufa, A., Lestari, A. D. E., Widya, A. T., Tamariska, R., & Adnan, M. (2023). Pelatihan dan Pembekalan Fasilitator Pemetaan Partisipatif Kampung Cungkeng dan Sinar Laut, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(1), 187–195. <https://doi.org/10.30653/jppm.v8i1.301>
- Syafitri, D. A. R. (2025). KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI: KONSEP, MODEL, DAN HAMBATAN. *AL MIDAD: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2(1), 33-42.
- Ulandari, W. R. (2025). *ANALISIS PARADIGMA POSITIVISME, KRITIS, KONSTRUKTIVISME SERTA PENERAPANNYA DALAM EKONOMI ISLAM*. 10(2).
- Albarracin, D., & Shavitt, S. (2018). Attitudes and Attitude Change. *Annual Review of Psychology*, 69(1), 299–327. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-011911>
- Balci, E. V., Tiryaki, S., & Karakuş, M. (2022). Exploring the Transformation of Opinion Leaders from a Traditional to a Digital Mindset. *International Journal of Organizational Leadership*, 11(Special Issue 2022), 36–50. <https://doi.org/10.33844/ijol.2022.60338>
- Hutomo, B., & Patrianti, T. (2025). Literature Analysis: The Role of Mass Communication in the Formation of Public Opinion and the Change of Public Behavior. *International Journal of Research and Review*, 12(9), 495–502. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250948>
- Ioana Schiau, "Review of The Interpersonal Communication Book, 13th edition by Joseph A. DeVito, New York: Pearson, 2012, 432 pages," *Review Journal of Communication and Public Relations* (2016)
- Koszowy, M., Budzynska, K., Pereira-Fariña, M., & Duthie, R. (2022). From Theory of Rhetoric to the Practice of Language Use: The Case of Appeals to Ethos Elements. *Argumentation*, 36(1), 123–149. <https://doi.org/10.1007/s10503-021-09564-0>
- Ningtias, I. S., Kustanti, A., & Sukesi, K. (2024). The Role and Participation of Family Welfare Empowerment Cadres (PKK) in Stunting Prevention: A Case Study in Bojonegoro. *International Journal of Community Service Learning*. <https://doi.org/10.23887/ijcs.v8i1.76160>
- Serman, Z. E., & Sims, J. (2023). Source Credibility Theory: SME Hospitality Sector Blog Posting During the Covid-19 Pandemic. *Information Systems Frontiers*, 25(6), 2317–2334. <https://doi.org/10.1007/s10796-022-10349-3>
- Stenzel, K., Weiß, M., & Hein, G. (2025). A Negative Reputation Reduces Trust Despite Trustworthy Behavior. *Psychophysiology*, 62(7), e70102. <https://doi.org/10.1111/psyp.70102>